

Pemprov Efisiensi Pemerintah Rp20 Miliar

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalteng terus pacu percepatan pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa di daerah ini, sehingga mencapai 75-80 persen dari 630 paket yang dilelang. “Terkait pengadaan barang dan jasa, kita akan terus percepat, karena itu berkaitan dengan penyerapan anggaran,” ujar Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, saat ditemui di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini.

Kita harapkan, ujar Fahrizal, dengan adanya lelang atau pengadaan barang dan jasa ini, maka segera dilakukan kontrak, sehingga nantinya akan berefek pada pergerakan perekonomian di daerah ini. “Karena, dengan adanya kontrak, maka ada pekerjaan. Jadi butuh barang, butuh pekerja, sehingga ini jadi lapangan pekerjaan dan terjadi pergerakan perekonomian,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fahrizal mengatakan, saat ini proses pengadaan barang dan jasa ini tetap berjalan namun ada yang terkendala. Karena berkenaan dengan pengadaan bahwa dan jasa ini, sebelum dilakukan lelang, terlebih dahulu harus diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Terpisah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalteng Benius mengatakan, saat ini pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan lelang sudah mencapai 400 paket lebih, dari total sebanyak 630 paket yang harus dilakukan lelang.

Sehingga sudah mencapai 75-80 persen sudah dilakukan lelang, sisanya kurang lebih 20 persen dan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut sampai saat ini sudah terjadi efisiensi atau pengiritan mencapai Rp20 miliar lebih. Sementara yang belum dilakukan lelang tersebut, ujar Benius, rata-rata adalah paket pengadaan barang dan beberapa pekerjaan fisik. Hal tersebut karena perencanaannya bersamaan dengan fisiknya atau ada yang melakukan redesain gambar bangunan tersebut. **(dkw)**

Sumber Berita :

1. Tabengan, *Pemprov Efisiensi Pemerintah Rp20 Miliar*, Rabu, 22 Mei 2019.
2. mmc.kalteng.go.id, *Perkuat Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Gelar Rakor*, Jumat, 3 Mei 2019.
3. beritasampit.co.id, *Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Meningkat, Gubernur Kalteng Pesan Ini?*, Kamis, 17 Januari 2019.

Catatan :

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa adalah meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam RUP.

RUP merupakan awal dari suatu proses pengadaan. Kegiatannya adalah mengidentifikasi kebutuhan mulai dari perencanaan hingga serah terima barang. Oleh karena itu RUP dimulai pada identifikasi kebutuhan, anggaran yang sudah ada, kebijakan umum, proses pemaketan dan mekanisme pengadaan barang jasa (swakelola, penyedia atau dengan cara *e-purchasing*).

Pada unsur perencanaan merupakan indikator yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya proses pengadaan, pada unsur pengendalian RUP merupakan indikator dalam proses monitoring dan evaluasi atas ketepatan waktu pengadaan barang/jasa. Sedangkan bagi penyedia, RUP merupakan sumber informasi prospek bisnis (peluang usaha) dan sumber informasi untuk mempersiapkan sumber daya sebelum mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Input data RUP diinput ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) yang dibangun oleh LKPP dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional. SiRUP disini merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.